B.1. PENETAPAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra 2025-2029
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis Pemkab	Prioritas Pembangunan	PD pengampu	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 2.2: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah	1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. 2. Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah. 3. Meningkatnya pemanfaatan aplikassi dan sistem informasi yang terpadu, aman dan mendukung efisiensi pelayanan pemerintahan berbasis digital. 4. Tersedianya data statistik sektoral yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 3. Indeks Pembangunan Statistik 4. Indeks Keamanan Informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital dan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pembangunan Statistik 3. Indeks Keamanan Informasi	-

Klaten, 26 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Aris Pramana, SE., MM
NIP. 19750718 200501 1 006

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Sasaran Strategis Pemerintah Daerah sesuai RPJMD
Kolom 3 : Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah
Kolom 4 : Perangkat Pengampu sasaran strategis Pemerintah Daerah
Kolom 5 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah
Kolom 6 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra yang akan disusun manajemen risiko
Kolom 7 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 8 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra
Kolom 9 : Keterangan

B.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Penilaian	2026
Periode yang dinilai	Renstra Periode 2025-2029
Sasaran Strategis Pemda	Sasaran 2.2: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol C/UC	Nilai Risiko				Pengendalian yang dibutuhkan			
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Pengendalian yang ada	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
								a	b	axb					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Keterlambatan penyampaian informasi publik	Kepala Dinas Kominfo	Proses birokrasi panjang, tidak ada *Service Level Agreement (SLA)* layanan	Menurunnya kepuasan masyarakat, potensi sengketa informasi	C	2	4	8	Tinggi	Layanan PPID manual & portal online	Penetapan Perjanjian Tingkat Layanan, monitoring layanan, help desk interaktif	Kepala Bidang Komunikasi dan Statitstik	Oktober 2026
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Statistik	Kualitas data rendah (tidak valid/inkonsisten)	Kepala Dinas kominfo	Perbedaan format dan definisi antar-OPD, kurang verifikasi	Data tidak dapat diintegrasikan, menurunkan kepercayaan publik	C	2	3	6	Sedang	Standar metadata dasar tersedia	Penerapan standar metadata baku, pelatihan validasi data, integrasi dengan Satu Data Indonesia	Kepala Bidang Komunikasi dan Statitstik	Oktober 2026
3	Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi	Kebocoran data/informasi pemerintah daerah	Kepala Dinas kominfo	Lemahnya kontrol akses, penggunaan perangkat tidak aman, dokumen rahasia tidak diklasifikasi	Data sensitif terekspos, menurunnya kepercayaan publik, potensi ancaman hukum	C	4	3	12	Tinggi	Penggunaan password & firewall dasar	Penerapan klasifikasi informasi (rahasia, terbatas, publik), otentikasi ganda, enkripsi data, audit	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026

Klaten, 26 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Aris Pramana, SE., MM
NIP. 19750718 200501 1 006

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai mana tercantum dalam Renstra
Kolom 3 : indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko dari sasaran strategis Perangkat Daerah
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol C/UC	Nilai Risiko				Pengendalian yang dibutuhkan			
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Pengendalian yang ada	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
								a	b	axb					

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
Kolom 7 : dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : skor kemungkinan
Kolom 10 : skor dampak
Kolom 11 : Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : Pengendalian yang masih dibutuhkan untuk mengurangi risiko (RTP)
Kolom 15 : Penanggung jawab RTP
Kolom 16 : Target waktu pelaksanaa

B.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Penilaian	2026
Sasaran Strategis Pemkab	Sasaran 2.2: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Keterlambatan penyampaian informasi publik	Penetapan Perjanjian Tingkat Layanan, monitoring layanan, help desk interaktif	Kepala Dinas Kominfo	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses persiapan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah	Kualitas data rendah (tidak valid/inkonsisten)	Penerapan standar metadata baku, pelatihan validasi data, integrasi dengan Satu Data Indonesia	Kepala Dinas Kominfo	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses persiapan
3	Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	Kebocoran data/informasi pemerintah daerah	Penerapan klasifikasi informasi (rahasia, terbatas, publik), otentikasi ganda, enkripsi data, audit keamanan rutin	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses persiapan

Klaten, 14 April 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Aris Pramana, SE., MM
NIP. 19750718 200501 1 006

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Sasaran strategis Perangkat Daerah
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan (RTP)
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)
Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)
Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

B.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah oleh Unit Kepatuhan Pemda /Perangkat Daerah

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Penilaian	2026
Sasaran Strategis Pemkab	Sasaran 2.2: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Keterlambatan penyampaian informasi publik	Penetapan Perjanjian Tingkat Layanan, monitoring layanan, help desk interaktif	Kepala Dinas Kominfo	Oktober 2026			Masih dalam proses persiapan
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah	Kualitas data rendah (tidak valid/inkonsisten)	Penerapan standar metadata baku, pelatihan validasi data, integrasi dengan Satu Data Indonesia	Kepala Dinas Kominfo	Oktober 2026			Masih dalam proses persiapan

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
3	Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	Kebocoran data/informasi pemerintah daerah	Penerapan klasifikasi informasi (rahasia, terbatas, publik), otentikasi ganda, enkripsi data, audit keamanan rutin	Kepala Dinas Kominfo	Oktober 2026			Masih dalam proses persiapan

Klaten, 16 April 2026
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuanga
Selaku Unit Kepatuhan Perangkat Daerah



Taufiq Hidayanto, ST
NIP. 19891012 201101 1 001

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan

C.1. Penetapan Tujuan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 3. Indeks Pembangunan Statistik 4. Indeks Keamanan Informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital dan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pembangunan Statistik 3. Indeks Keamanan Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
								Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Klaten, 26 September 2025
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Andi Hermanto, S.Kom., M.Eng.
NIP. 19830418 200904 1 003

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah
Kolom 3 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 4 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra
Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra
Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis
Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis
Kolom 9 : Sub kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis
Kolom 10 : Indikator program atau sub kegiatan sesuai perencanaan
Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan

C.1. Penetapan Tujuan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 3. Indeks Pembangunan Statistik 4. Indeks Keamanan Informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital dan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pembangunan Statistik 3. Indeks Keamanan Informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	
							Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
								Sub Kegiatan Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	
								Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	
								Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
								Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	
								Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	
										Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
							Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	
								Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	

Klaten, 26 September 2025
Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Pinandita Bima Mahendra, ST
NIP. 19880901 201101 1 006

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah
Kolom 3 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 4 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra
Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra
Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis
Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis
Kolom 9 : Sub kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis
Kolom 10 : Indikator program atau sub kegiatan sesuai perencanaan
Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan

C.1. Penetapan Tujuan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021 - 2026

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 3. Indeks Pembangunan Statistik 4. Indeks Keamanan Informasi	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital dan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pembangunan Statistik 3. Indeks Keamanan Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi yang terpadu, aman, dan mendukung efisiensi pelayanan pemerintahan berbasis digital				Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	
										Persentase Capaian Digitalisasi Pemerintahan	
							Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
								Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
								Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah				Tingkat keamanan informasi pemerintah	
							Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pengamanan informasi yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Persentase pengamanan informasi yang diamankan dengan sertifikat elektronik	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Klaten, 26 September 2025

Kepala Bidang Informatika dan Persandian

Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Heri Wismo Handono, S.E., M.M.

NIP. 19690107 198903 1 003

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah
Kolom 3 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 4 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra
Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra
Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis
Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis
Kolom 9 : Sub kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis
Kolom 10 : Indikator program atau sub kegiatan sesuai perencanaan
Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan

C.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Sasaran Strategis PD	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Administrasi pemerintahan tidak tertib	Sekretaris Dinas	Kurangnya koordinasi dan SOP, lemahnya pengawasan internal	Proses kerja ASN tidak efektif, rawan temuan audit	C	2	4	8	Tinggi	SOP dasar administrasi, arsip manual	E	Monitoring dan evaluasi belum rutin	Digitalisasi administrasi, monitoring kepatuhan, audit internal berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah															
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran tidak realistis	Sekretaris Dinas	Data dasar kurang akurat, estimasi biaya tidak tepat	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan optimal, potensi pemborosan	C	2	2	4	Rendah	Proses penyusunan RKA sesuai pedoman	E	Tidak ada standar biaya rinci dan cost analysis	Penyusunan RAB berbasis kebutuhan riil, benchmarking harga pasar, pengendalian melalui SIPD	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan disusun terlambat	Sekretaris Dinas	Keterlambatan input data, SDM terbatas, proses birokrasi panjang	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu, menurunkan kinerja perangkat daerah	C	2	2	4	Rendah	Jadwal penyusunan Renstra/Renja ditetapkan	E	Monitoring progres penyusunan belum optimal	Sistem monitoring penyusunan berbasis aplikasi (SIPD/e-planning), penetapan timeline detail	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data kinerja yang digunakan tidak akurat	Sekretaris Dinas	Unit kerja tidak menyampaikan data mutakhir, kurang verifikasi	Analisis kinerja bias, keputusan salah arah	C	2	2	4	Rendah	Laporan capaian tahunan OPD tersedia	E	Validasi data belum berlapis, integrasi data terbatas	Integrasi data dengan Satu Data Daerah, mekanisme validasi berjenjang	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Keterlambatan penyusunan dan pelaporan keuangan	Sekretaris Dinas	Proses administrasi lambat, SDM terbatas, aplikasi keuangan tidak optimal	Laporan keuangan tidak tepat waktu, potensi sanksi administratif	C	2	2	4	Rendah	Aplikasi SIPD Keuangan digunakan, jadwal penyusunan sudah ditetapkan	E	Monitoring real-time belum ada, evaluasi internal terbatas	Sistem monitoring berbasis aplikasi, timeline rinci, evaluasi progres berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Sekretaris Dinas	Proses administrasi lambat, keterlambatan transfer dari BUD/Bank	ASN tidak puas, potensi penurunan motivasi kerja	C	2	2	4	Rendah	Jadwal pembayaran rutin bulanan, aplikasi SIPD Keuangan	E	Monitoring real-time belum berjalan optimal	Sistem monitoring pembayaran otomatis, SLA pencairan gaji dengan BUD	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak tertib	Sekretaris Dinas	SOP belum dijalankan konsisten, lemahnya pengawasan	Kinerja ASN tidak terdokumentasi dengan baik, potensi temuan audit	C	2	2	4	Rendah	SOP administrasi ASN tersedia	E	Belum ada monitoring kepatuhan rutin	Sistem monitoring administrasi berbasis aplikasi, audit internal berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	Sekretaris Dinas	Keterbatasan SDM, proses verifikasi lambat, koordinasi antarbidang kurang	Laporan tidak sesuai jadwal, potensi sanksi administratif, menurunkan kinerja SKPD	C	2	2	4	Rendah	Jadwal penyusunan laporan sudah ditetapkan, penggunaan aplikasi SIPD	E	Monitoring real-time belum optimal, pengawasan internal lemah	Penerapan sistem monitoring progres laporan, timeline detail, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Koordinasi kepegawaian lintas bidang kurang optimal	Sekretaris Dinas	Tidak ada forum komunikasi terjadwal	Layanan kepegawaian berjalan lambat dan tidak efisien	C	2	2	4	Rendah	Rapat koordinasi insidental	E	Tidak ada forum berkala & terdokumentasi	Forum koordinasi bulanan, notulensi & tindak lanjut wajib	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rendahnya partisipasi peserta sosialisasi	Sekretaris Dinas	Undangan tidak menyeluruh, jadwal tidak sesuai, minim publikasi	Target sasaran tidak tercapai, efektivitas kegiatan rendah	C	2	2	4	Rendah	Undangan resmi kepada OPD/masyarakat, publikasi melalui website	E	Media publikasi masih terbatas, tidak ada monitoring peserta	Perluasan saluran publikasi (media sosial, WA grup, baliho), reminder ke peserta, monitoring kehadiran	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	Administrasi surat-menyurat tidak tertib	Sekretaris Dinas	SOP tidak dijalankan konsisten, pencatatan manual, kurang pengawasan	Dokumen hilang/terlambat diproses, gangguan layanan	C	2	2	4	Rendah	SOP tata naskah dinas ada, buku agenda manual	E	Belum semua surat terdigitalisasi, tracking lemah	Digitalisasi surat menyurat (e-office), sistem tracking dokumen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan peralatan tidak sesuai kebutuhan	Sekretaris Dinas	Analisis kebutuhan tidak akurat, koordinasi antarbidang kurang	Peralatan tidak termanfaatkan optimal, pemborosan anggaran	C	2	2	4	Rendah	Proses usulan kebutuhan melalui RKA	E	Belum ada analisis kebutuhan berbasis kinerja	Penyusunan needs assessment terukur, review kebutuhan lintas bidang	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keterlambatan dalam penyambutan/layanan tamu	Sekretaris Dinas	Koordinasi internal kurang, jadwal kunjungan tidak dipersiapkan dengan baik	Menurunnya citra Diskominfo, ketidakpuasan tamu	C	2	2	4	Rendah	Jadwal kunjungan dicatat manual, staf penerima tamu tersedia	E	Tidak ada sistem penjadwalan terintegrasi	Penerapan sistem penjadwalan kunjungan berbasis aplikasi, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rendahnya tingkat kehadiran peserta rapat	Sekretaris Dinas	Jadwal berbenturan, undangan tidak tersampaikan dengan baik, kurangnya komitmen peserta	Hasil rapat tidak representatif, koordinasi antar-SKPD terganggu	C	2	2	4	Rendah	Undangan resmi melalui surat/nota dinas	E	Belum ada sistem reminder dan manajemen jadwal terintegrasi	Sinkronisasi agenda lintas SKPD, penggunaan aplikasi e-reminder (WA/email), penetapan jadwal jauh hari	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah yang Tersedia	Mark-up harga pengadaan	Sekretaris Dinas	Kurangnya survei harga pasar, lemahnya pengawasan internal	Kerugian keuangan daerah, temuan BPK/Inspektorat, citra buruk pemerintah	C	2	3	6	Sedang	Proses e-purchasing/LPSE sudah ada	E	Survei harga pembanding belum optimal, evaluasi harga kurang mendalam	Penguatan mekanisme market sounding, publikasi harga referensi, verifikasi independen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan															
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Spesifikasi mebel tidak sesuai kebutuhan	Sekretaris Dinas	Perencanaan kebutuhan kurang detail, TOR/RAB tidak jelas	Mebel tidak mendukung kenyamanan kerja, menurunkan produktivitas ASN	C	2	3	6	Sedang	Penyusunan TOR dan RAB pengadaan	E	Validasi spesifikasi hanya administratif	Survei kebutuhan pengguna, uji sampel/produk sebelum kontrak	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kualitas sarana/prasarana tidak sesuai spesifikasi	Sekretaris Dinas	Penyedia tidak kompeten, lemahnya pengawasan teknis	Gedung cepat rusak, biaya perawatan meningkat	C	2	3	6	Sedang	Ada tim teknis pengawas pekerjaan	E	Pengawasan lapangan terbatas, tidak rutin	Pengawasan harian, penggunaan konsultan independen untuk quality assurance	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	Kualitas jasa penunjang tidak sesuai standar	Sekretaris Dinas	Penyedia jasa kurang kompeten, proses pemilihan tidak ketat	Kinerja perangkat daerah terganggu, output tidak optimal	C	2	2	4	Rendah	Proses pengadaan sesuai aturan	E	Evaluasi kualitas penyedia jasa masih terbatas	Mekanisme evaluasi kinerja penyedia jasa secara periodik, kontrak dengan SLA (Service Level Agreement)	Sekretaris Dinas	Oktober 2026

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Keterlambatan pembayaran tagihan listrik, air, atau komunikasi	Sekretaris Dinas	Administrasi pembayaran kurang tertib, keterbatasan anggaran	Pemutusan layanan, pelayanan kantor lumpuh	C	2	2	4	Rendah	Proses verifikasi tagihan rutin oleh bendahara	E	Belum ada pengingat otomatis dan sistem penjadwalan pembayaran	Sistem pembayaran elektronik terjadwal, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kualitas jasa pelayanan umum rendah	Sekretaris Dinas	Pemilihan penyedia jasa kurang selektif, pengawasan lemah	Kepuasan kerja ASN menurun, produktivitas terhambat	C	2	2	4	Rendah	Ada mekanisme pemilihan penyedia jasa	E	Evaluasi kinerja penyedia jasa tidak rutin	Evaluasi berkala penyedia jasa dengan indikator kinerja (KPI)	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Barang milik daerah (BMD) cepat rusak/tidak berfungsi optimal	Sekretaris Dinas	Pemeliharaan tidak rutin, kurangnya perawatan teknis	Efektivitas pelayanan menurun, biaya perbaikan meningkat	C	2	2	4	Rendah	Jadwal pemeliharaan tahunan tersedia	E	Jadwal belum detail dan tidak dipantau ketat	Penyusunan jadwal pemeliharaan rutin terintegrasi, monitoring realisasi pemeliharaan	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan tidak layak operasional akibat kurang perawatan	Sekretaris Dinas	Jadwal servis tidak rutin, anggaran perawatan terbatas	Kendaraan mogok di lapangan, menghambat kegiatan operasional	C	2	2	4	Rendah	Jadwal servis tahunan	E	Pemeriksaan harian belum terstruktur	SOP pemeriksaan harian kendaraan, check-list rutin, kontrak servis berkala dengan bengkel resmi	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Keterlambatan pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi	Sekretaris Dinas	Perencanaan waktu kurang matang, keterlambatan kontraktor, cuaca ekstrem	Gangguan operasional kantor, keterlambatan pelayanan publik	C	2	2	4	Rendah	Jadwal kerja dibuat di awal proyek	E	Monitoring pelaksanaan belum intensif	Pengawasan progres rutin, sanksi keterlambatan kontraktor, penjadwalan berbasis risiko cuaca	Sekretaris Dinas	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kualitas pekerjaan rendah	Sekretaris Dinas	Kurangnya pengawasan teknis, penyedia jasa tidak kompeten, penggunaan material di bawah standar	Bangunan cepat rusak kembali, pemborosan anggaran	C	2	2	4	Rendah	Pengawasan oleh PPK/kontraktor pengawas	E	Pengendalian mutu belum konsisten	Audit teknis berkala, penggunaan konsultan pengawas independen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026

Klaten, 26 September 2025
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku UPN Operasional Perangkat Daerah

Andi Hermanto, S.Kom., M.Eng.
NIP. 19830418 200904 1 003

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : Skor kemungkinan
Kolom 10 : Skor dampak
Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif
Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan
Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu

Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian
Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

C.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Sasaran Strategis PD	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penang gung Jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Informasi publik tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Media publikasi terbatas, distribusi informasi tidak merata	Rendahnya pemahaman masyarakat, berpotensi menurunkan kepercayaan publik	C	2	4	8	Tinggi	Website resmi dan media sosial aktif	E	Jangkauan audiens belum maksimal, monitoring efektivitas terbatas	Diversifikasi kanal publikasi (TV lokal, radio, media komunitas), survei kepuasan dan efektivitas komunikasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Potensi hoaks dan disinformasi meningkat	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Rendahnya literasi digital, kurangnya monitoring isu publik	Gangguan opini publik, munculnya keresahan sosial	C	2	4	8	Tinggi	Tim pengelola media sosial aktif	E	Belum ada sistem deteksi dini konten hoaks	Penguatan unit monitoring isu strategis, kerjasama dengan Kominfo pusat/relawan digital	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Hubungan dengan media tidak harmonis	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Kurangnya komunikasi rutin, keterlambatan dalam merespons kebutuhan media	Publikasi pemerintah daerah menurun, citra lembaga terganggu	C	2	2	4	Rendah	Ada humas/media center yang berfungsi	E	Tidak ada forum komunikasi periodik	Forum silaturahmi rutin dengan media, MoU/kerja sama formal dengan media lokal	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi rendah	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Rendahnya literasi informasi publik, minim sosialisasi	Informasi publik tidak dimanfaatkan optimal, kebijakan kurang dipahami masyarakat	C	2	2	4	Rendah	Website resmi dan kanal PPID tersedia	E	Sosialisasi layanan masih terbatas	Sosialisasi masif melalui media sosial, radio, komunitas, dan literasi informasi publik	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Konten media komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berkualitas	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	SDM terbatas, kurangnya pedoman editorial, tidak ada quality control	Penurunan kredibilitas Diskominfo, informasi tidak efektif tersampaikan	C	2	4	8	Tinggi	Terdapat tim admin media sosial dan web	E	Belum ada standar kualitas konten baku	Penyusunan pedoman editorial, mekanisme review konten sebelum publikasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kualitas konten kurang menarik/informatif	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	SDM kreator konten terbatas, riset konten kurang mendalam	Rendahnya minat masyarakat, pesan publik tidak tersampaikan	C	2	4	8	Tinggi	SOP penyusunan konten, tim kreatif tersedia	E	Tidak ada standar kualitas terukur, evaluasi konten belum rutin	Panduan kualitas konten, review berkala, survei kepuasan audiens	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penang gung Jawab	Target Waktu
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Tingkat partisipasi SDM rendah	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Jadwal berbenturan dengan tugas lain, kurangnya motivasi	Target peningkatan kapasitas tidak tercapai, kualitas layanan komunikasi publik menurun	C	2	2	4	Rendah	Surat tugas dan daftar hadir	E	Tidak ada sistem monitoring kehadiran dan motivasi	Sistem tracking partisipasi, pemberian insentif berbasis kinerja	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Kualitas data statistik sektoral rendah (tidak akurat/inkonsisten)	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Metodologi pengumpulan data tidak seragam, keterbatasan SDM statistik	Data sulit digunakan sebagai dasar perencanaan, berpotensi salah arah kebijakan	C	2	4	8	Tinggi	Pedoman teknis pengumpulan data sudah tersedia	E	Belum semua perangkat daerah menerapkan pedoman dengan disiplin	Standarisasi metode pengumpulan data, bimbingan teknis dan audit data sektoral rutin	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah															
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Data sektoral tidak terkumpul secara lengkap	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Kurangnya koordinasi antar-OPD, keterlambatan pelaporan data	Kualitas statistik sektoral rendah, perencanaan pembangunan tidak akurat	C	2	4	8	Tinggi	Ada permintaan data rutin ke OPD	E	Belum ada standar mekanisme pengumpulan data yang baku	SOP pengumpulan data sektoral lintas OPD, penggunaan aplikasi Satu Data Daerah	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kelembagaan statistik sektoral tidak berjalan optimal	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Belum ada regulasi internal yang kuat, lemahnya komitmen pimpinan	Tugas dan fungsi statistik sektoral tidak jelas, koordinasi lemah	C	2	3	6	Sedang	SK pembentukan tim statistik sektoral	E	Regulasi belum terperinci, belum ada SOP kelembagaan	Penyusunan SOP kelembagaan statistik sektoral, penguatan regulasi daerah terkait Satu Data	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026

Klaten, 26 September 2025
Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Pinandita Bima Mahendra, ST
NIP. 19880901 201101 1 006

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : Skor kemungkinan
Kolom 10 : Skor dampak
Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif
Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan
Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian
Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

C.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025 - 2029
Sasaran Strategis PD	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penang gung Jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Analisis kebutuhan kurang mendalam, keterlibatan user rendah	Aplikasi tidak optimal dimanfaatkan, pemborosan anggaran	C	2	4	8	Tinggi	Forum koordinasi teknis dengan OPD	E	Analisis kebutuhan belum standar, keterlibatan pengguna terbatas	Standar analisis kebutuhan (user requirement) dan FGD wajib sebelum pengembangan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
		Persentase Capaian Digitalisasi Pemerintahan															
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Tidak optimalnya implementasi e-government	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Perencanaan belum berbasis arsitektur SPBE, koordinasi antar OPD lemah	Layanan digital terfragmentasi, inefisiensi anggaran	C	2	4	8	Tinggi	Ada dokumen arsitektur SPBE daerah	E	Penerapan masih parsial, belum menyeluruh	Penguatan regulasi dan kewajiban penerapan arsitektur SPBE lintas OPD	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE lemah	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Belum ada instrumen Monev yang baku	Sulit mengukur capaian kinerja SPBE, rawan temuan audit	C	2	2	4	Rendah	Laporan SPBE tahunan dibuat	E	Indikator kinerja belum lengkap, evaluasi tidak konsisten	Sistem monitoring terintegrasi, dashboard capaian SPBE real-time	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Gangguan jaringan intra pemerintah (downtime)	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Infrastruktur TIK tidak andal, pemeliharaan terbatas	Layanan pemerintahan terhenti, keterlambatan layanan publik	C	2	2	4	Rendah	Pemeliharaan jaringan dilakukan secara periodik	E	Monitoring jaringan belum real-time, respon gangguan lambat	Pusat operasi jaringan (NOC), network monitoring system 24/7, SOP penanganan insiden	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
			Kurangnya SDM pengelola jaringan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Kompetensi teknis terbatas, beban kerja tinggi	Penanganan gangguan lambat, risiko downtime tinggi	C	2	2	4	Rendah	Ada staf teknis jaringan di Diskominfo	E	SDM terbatas dan belum bersertifikasi	Pelatihan & sertifikasi SDM jaringan, penambahan tenaga teknis	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi yang dibangun tidak sesuai arsitektur SPBE	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Analisis kebutuhan tidak komprehensif, lemahnya koordinasi dengan Tim SPBE	Duplikasi sistem, tidak terintegrasi dengan aplikasi lain	C	2	2	4	Rendah	Terdapat dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	E	Belum ada mekanisme review teknis wajib terhadap aplikasi baru	SOP review teknis aplikasi sesuai arsitektur SPBE sebelum pembangunan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi antar-perangkat daerah tidak optimal	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Kurangnya komitmen, komunikasi lintas sektor belum efektif	Program Kota Cerdas berjalan parsial, tidak terintegrasi	C	2	2	4	Rendah	Forum koordinasi lintas OPD sudah ada	E	Belum ada mekanisme monitoring tindak lanjut rapat	Penetapan governance structure dan steering committee khusus Kota Cerdas	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026

No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang di butuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penang gung Jawab	Target Waktu
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Kebocoran informasi rahasia pemerintah	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Protokol enkripsi tidak mutakhir, lemahnya pengendalian akses	Hilangnya kerahasiaan data, ancaman terhadap keamanan negara/daerah	C	2	4	8	Tinggi	Penerapan sandi dasar dan enkripsi dokumen	E	Tidak semua sistem menggunakan enkripsi standar, tidak ada audit keamanan rutin	Penggunaan algoritma enkripsi terkini, audit keamanan persandian berkala	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan informasi yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Serangan siber terhadap sistem persandian	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Minimnya pengujian keamanan (penetration test), keterbatasan SDM pengelola	Sistem persandian lumpuh, data terenkripsi dapat ditembus	C	2	4	8	Tinggi	Penggunaan firewall dan antivirus standar	E	Penetration test tidak rutin, tidak ada monitoring 24/7	Audit keamanan dan penetration test berkala, SOC (Security Operation Center) daerah	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Gangguan operasional sistem elektronik	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Infrastruktur TI terbatas, server tidak redundant	Gangguan layanan informasi, data tidak dapat diakses	C	2	2	4	Rendah	Server lokal tersedia	E	Tidak ada backup system dan DRP (Disaster Recovery Plan)	Implementasi disaster recovery plan, sistem backup dan failover	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026

Klaten, 26 September 2025
Kepala Bidang Informatika dan Persandian
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Heri Wismo Handono, S.E., M.M.
NIP. 19690107 198903 1 003

Keterangan:
Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis
Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan
Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*
Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi
Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom 9 : Skor kemungkinan
Kolom 10 : Skor dampak
Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak
Kolom 12 : Tingkat risiko
Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada
Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif
Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan
Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian
Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

C.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Sasaran Strategis Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi pemerintahan tidak tertib	Digitalisasi administrasi, monitoring kepatuhan, audit internal berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran tidak realistis	Penyusunan RAB berbasis kebutuhan riil, benchmarking harga pasar, pengendalian melalui SIPD	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan disusun terlambat	Sistem monitoring penyusunan berbasis aplikasi (SIPD/e-planning), penetapan timeline detail	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data kinerja yang digunakan tidak akurat	Integrasi data dengan Satu Data Daerah, mekanisme validasi berjenjang	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keterlambatan penyusunan dan pelaporan keuangan	Sistem monitoring berbasis aplikasi, timeline rinci, evaluasi progres berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Sistem monitoring pembayaran otomatis, SLA pencairan gaji dengan BUD	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak tertib	Sistem monitoring administrasi berbasis aplikasi, audit internal berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	Penerapan sistem monitoring progres laporan, timeline detail, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi kepegawaian lintas bidang kurang optimal	Forum koordinasi bulanan, notulensi & tindak lanjut wajib	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rendahnya partisipasi peserta sosialisasi	Perluasan saluran publikasi (media sosial, WA grup, baliho), reminder ke peserta, monitoring kehadiran	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi surat-menyurat tidak tertib	Digitalisasi surat menyurat (e-office), sistem tracking dokumen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan tidak sesuai kebutuhan	Penyusunan needs assessment terukur, review kebutuhan lintas bidang	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keterlambatan dalam penyambutan/layanan tamu	Penerapan sistem penjadwalan kunjungan berbasis aplikasi, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rendahnya tingkat kehadiran peserta rapat	Sinkronisasi agenda lintas SKPD, penggunaan aplikasi e-reminder (WA/email), penetapan jadwal jauh hari	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mark-up harga pengadaan	Penguatan mekanisme market sounding, publikasi harga referensi, verifikasi independen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Spesifikasi mebel tidak sesuai kebutuhan	Survei kebutuhan pengguna, uji sampel/produk sebelum kontrak	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kualitas sarana/prasarana tidak sesuai spesifikasi	Pengawasan harian, penggunaan konsultan independen untuk quality assurance	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas jasa penunjang tidak sesuai standar	Mekanisme evaluasi kinerja penyedia jasa secara periodik, kontrak dengan SLA (Service Level Agreement)	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keterlambatan pembayaran tagihan listrik, air, atau komunikasi	Sistem pembayaran elektronik terjadwal, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kualitas jasa pelayanan umum rendah	Evaluasi berkala penyedia jasa dengan indikator kinerja (KPI)	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah (BMD) cepat rusak/tidak berfungsi optimal	Penyusunan jadwal pemeliharaan rutin terintegrasi, monitoring realisasi pemeliharaan	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kerusakan terlambat terdeteksi	Aplikasi pelaporan kerusakan real-time, tim inspeksi berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kendaraan tidak layak operasional akibat kurang perawatan	SOP pemeriksaan harian kendaraan, check-list rutin, kontrak servis berkala dengan bengkel resmi	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keterlambatan pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi	Pengawasan progres rutin, sanksi keterlambatan kontraktor, penjadwalan berbasis risiko cuaca	Sekretaris Dinas	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan

Klaten, 14 April 2026
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Andi Hermanto, S.Kom., M.Eng.
NIP. 19830418 200904 1 003

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)
Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)
Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

C.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Sasaran Strategis Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi publik tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Diversifikasi kanal publikasi (TV lokal, radio, media komunitas), survei kepuasan dan efektivitas komunikasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Potensi hoaks dan disinformasi meningkat	Penguatan unit monitoring isu strategis, kerjasama dengan Kominfo pusat/relawan digital	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Relasi Media	Hubungan dengan media tidak harmonis	Forum silaturahmi rutin dengan media, MoU/kerja sama formal dengan media lokal	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi rendah	Sosialisasi masif melalui media sosial, radio, komunitas, dan literasi informasi publik	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten media komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berkualitas	Penyusunan pedoman editorial, mekanisme review konten sebelum publikasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kualitas konten kurang menarik/informatif	Panduan kualitas konten, review berkala, survei kepuasan audiens	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tingkat partisipasi SDM rendah	Sistem tracking partisipasi, pemberian insentif berbasis kinerja	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
								Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kualitas data statistik sektoral rendah (tidak akurat/inkonsisten)	Standarisasi metode pengumpulan data, bimbingan teknis dan audit data sektoral rutin	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data sektoral tidak terkumpul secara lengkap	SOP pengumpulan data sektoral lintas OPD, penggunaan aplikasi Satu Data Daerah	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kelembagaan statistik sektoral tidak berjalan optimal	Penyusunan SOP kelembagaan statistik sektoral, penguatan regulasi daerah terkait Satu Data	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

Klaten, 14 April 2026
Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Pinandita Bima Mahendra, ST
NIP. 19880901 201101 1 006

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

C.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Sasaran Strategis Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna	Standar analisis kebutuhan (user requirement) dan FGD wajib sebelum pengembangan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tidak optimalnya implementasi e-government	Penguatan regulasi dan kewajiban penerapan arsitektur SPBE lintas OPD	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE lemah	Sistem monitoring terintegrasi, dashboard capaian SPBE real-time	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Gangguan jaringan intra pemerintah (downtime)	Pusat operasi jaringan (NOC), network monitoring system 24/7, SOP penanganan insiden	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
		Kurangnya SDM pengelola jaringan	Pelatihan & sertifikasi SDM jaringan, penambahan tenaga teknis	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Aplikasi yang dibangun tidak sesuai arsitektur SPBE	SOP review teknis aplikasi sesuai arsitektur SPBE sebelum pembangunan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Koordinasi antar-perangkat daerah tidak optimal	Penetapan governance structure dan steering committee khusus Kota Cerdas	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kebocoran informasi rahasia pemerintah	Penggunaan algoritma enkripsi terkini, audit keamanan persandian berkala	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Serangan siber terhadap sistem persandian	Audit keamanan dan penetration test berkala, SOC (Security Operation Center) daerah	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Gangguan operasional sistem elektronik	Implementasi disaster recovery plan, sistem backup dan failover	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026	Rapat Koordinasi		Masih dalam proses

Klaten, 14 April 2026
Kepala Bidang Informatika dan Persandian
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Heri Wismo Handono, S.E., M.M.
NIP. 19690107 198903 1 003

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi RTP)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan RTP kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

C.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Sasaran Strategis Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi pemerintahan tidak tertib	Digitalisasi administrasi, monitoring kepatuhan, audit internal berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan anggaran tidak realistis	Penyusunan RAB berbasis kebutuhan riil, benchmarking harga pasar, pengendalian melalui SIPD	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan disusun terlambat	Sistem monitoring penyusunan berbasis aplikasi (SIPD/e-planning), penetapan timeline detail	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data kinerja yang digunakan tidak akurat	Integrasi data dengan Satu Data Daerah, mekanisme validasi berjenjang	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keterlambatan penyusunan dan pelaporan keuangan	Sistem monitoring berbasis aplikasi, timeline rinci, evaluasi progres berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Sistem monitoring pembayaran otomatis, SLA pencairan gaji dengan BUD	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak tertib	Sistem monitoring administrasi berbasis aplikasi, audit internal berkala	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	Penerapan sistem monitoring progres laporan, timeline detail, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi kepegawaian lintas bidang kurang optimal	Forum koordinasi bulanan, notulensi & tindak lanjut wajib	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rendahnya partisipasi peserta sosialisasi	Perluasan saluran publikasi (media sosial, WA grup, baliho), reminder ke peserta, monitoring kehadiran	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi surat-menyurat tidak tertib	Digitalisasi surat menyurat (e-office), sistem tracking dokumen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan tidak sesuai kebutuhan	Penyusunan needs assessment terukur, review kebutuhan lintas bidang	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keterlambatan dalam penyambutan/layanan tamu	Penerapan sistem penjadwalan kunjungan berbasis aplikasi, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rendahnya tingkat kehadiran peserta rapat	Sinkronisasi agenda lintas SKPD, penggunaan aplikasi e-reminder (WA/email), penetapan jadwal jauh hari	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mark-up harga pengadaan	Penguatan mekanisme market sounding, publikasi harga referensi, verifikasi independen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Spesifikasi mebel tidak sesuai kebutuhan	Survei kebutuhan pengguna, uji sampel/produk sebelum kontrak	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kualitas sarana/prasarana tidak sesuai spesifikasi	Pengawasan harian, penggunaan konsultan independen untuk quality assurance	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas jasa penunjang tidak sesuai standar	Mekanisme evaluasi kinerja penyedia jasa secara periodik, kontrak dengan SLA (Service Level Agreement)	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keterlambatan pembayaran tagihan listrik, air, atau komunikasi	Sistem pembayaran elektronik terjadwal, reminder otomatis	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kualitas jasa pelayanan umum rendah	Evaluasi berkala penyedia jasa dengan indikator kinerja (KPI)	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah (BMD) cepat rusak/tidak berfungsi optimal	Penyusunan jadwal pemeliharaan rutin terintegrasi, monitoring realisasi pemeliharaan	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kerusakan terlambat terdeteksi	SOP pemeriksaan harian kendaraan, check-list rutin, kontrak servis berkala dengan bengkel resmi	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kendaraan tidak layak operasional akibat kurang perawatan	Pengawasan progres rutin, sanksi keterlambatan kontraktor, penjadwalan berbasis risiko cuaca	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keterlambatan pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi	Audit teknis berkala, penggunaan konsultan pengawas independen	Sekretaris Dinas	Oktober 2026			Masih dalam proses

Klaten, 16 April 2026
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selaku Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Taufiq Hidayanto, ST
NIP. 19891012 201101 1 001

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan

Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan

C.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2026
Sasaran Strategis Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi publik tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat	Diversifikasi kanal publikasi (TV lokal, radio, media komunitas), survei kepuasan dan efektivitas komunikasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Potensi hoaks dan disinformasi meningkat	Penguatan unit monitoring isu strategis, kerjasama dengan Kominfo pusat/relawan digital	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Relasi Media	Hubungan dengan media tidak harmonis	Forum silaturahmi rutin dengan media, MoU/kerja sama formal dengan media lokal	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi rendah	Sosialisasi masif melalui media sosial, radio, komunitas, dan literasi informasi publik	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten media komunikasi publik tidak konsisten dan tidak berkualitas	Penyusunan pedoman editorial, mekanisme review konten sebelum publikasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Kualitas konten kurang menarik/informatif	Panduan kualitas konten, review berkala, survei kepuasan audiens	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tingkat partisipasi SDM rendah	Sistem tracking partisipasi, pemberian insentif berbasis kinerja	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kualitas data statistik sektoral rendah (tidak akurat/inkonsisten)	Standarisasi metode pengumpulan data, bimbingan teknis dan audit data sektoral rutin	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data sektoral tidak terkumpul secara lengkap	SOP pengumpulan data sektoral lintas OPD, penggunaan aplikasi Satu Data Daerah	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kelembagaan statistik sektoral tidak berjalan optimal	Penyusunan SOP kelembagaan statistik sektoral, penguatan regulasi daerah terkait Satu Data	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	Oktober 2026			Masih dalam proses

Klaten, 16 April 2026
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selaku Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Taufiq Hidayanto, ST
NIP. 19891012 201101 1 001

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan

C.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Klaten
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2025
Sasaran Strategis Perangkat Daerah	1. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan keamanan informasi pada Pemerintah Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna	Standar analisis kebutuhan (user requirement) dan FGD wajib sebelum pengembangan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tidak optimalnya implementasi e-government	Penguatan regulasi dan kewajiban penerapan arsitektur SPBE lintas OPD	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE lemah	Sistem monitoring terintegrasi, dashboard capaian SPBE real-time	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Gangguan jaringan intra pemerintah (downtime)	Pusat operasi jaringan (NOC), network monitoring system 24/7, SOP penanganan insiden	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
		Kurangnya SDM pengelola jaringan	Pelatihan & sertifikasi SDM jaringan, penambahan tenaga teknis	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan	Aplikasi yang dibangun tidak sesuai arsitektur SPBE	SOP review teknis aplikasi sesuai arsitektur SPBE sebelum pembangunan	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Koordinasi antar-perangkat daerah tidak optimal	Penetapan governance structure dan steering committee khusus Kota Cerdas	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kebocoran informasi rahasia pemerintah	Penggunaan algoritma enkripsi terkini, audit keamanan persandian berkala	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Serangan siber terhadap sistem persandian	Audit keamanan dan penetration test berkala, SOC (Security Operation Center) daerah	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses

No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Gangguan operasional sistem elektronik	Implementasi disaster recovery plan, sistem backup dan failover	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Oktober 2026			Masih dalam proses

Klaten, 16 April 2026
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selaku Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Taufiq Hidayanto, ST
NIP. 19891012 201101 1 001

Keterangan:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas
Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan
Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan